

## Siaran Pers

# **PERAN KEUANGAN SYARIAH UNTUK MENGENTASKAN KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN**

Jakarta (24/8) – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro hadir sebagai pembicara pada **2<sup>nd</sup> Annual Islamic Finance Conference** yang digelar Kementerian Keuangan di Yogyakarta, 26-27 Agustus 2017. Dalam sambutannya, Menteri Bambang berharap konferensi internasional yang dihadiri para pemangku kepentingan keuangan syariah tersebut menjadi ajang berdiskusi dan berbagi pengalaman tentang bagaimana keuangan syariah dapat berperan mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan, serta berfungsi sebagai jembatan kolaborasi antara pemerintah dan publik dalam mencapai target pembangunan dengan menurunkan tingkat kemiskinan dan meminimalkan jurang pendapatan. “Patut diingat, meski mayoritas negara di dunia tengah mengalami perbaikan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan masih menjadi isu penting, termasuk bagi Indonesia,” tegas Menteri Bambang.

Beberapa tahun belakangan, tingkat kemiskinan di Indonesia makin menurun. Ketika diukur dengan paritas daya beli sebesar 1,25 dolar Amerika Serikat per kapita/hari, tingkat kemiskinan Indonesia menurun dari 28,32 persen pada 2006 menjadi kira-kira 8,80 persen pada 2015. Diukur dengan garis kemiskinan nasional, tingkat kemiskinan Indonesia menurun dari 17,75 persen orang yang hidup di bawah garis kemiskinan pada 2006, menjadi 10,64 persen pada 2017. Namun, tren terkini menunjukkan bahwa pada periode lima tahun terakhir, penurunan angka kemiskinan cenderung datar sehingga perlu kerja keras untuk mencapai target akhir kemiskinan seperti yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Kemiskinan dan ketimpangan juga menjadi fokus utama dalam Agenda 2030, suatu rencana global yang holistik, universal, dan transformatif yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam United Nations Sustainable Development Summit 2015 untuk diimplementasikan bagi 193 negara anggotanya. PBB juga mencanangkan tujuh belas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs), agenda pembangunan yang membidik komitmen dunia untuk mengakhiri kemiskinan dan mengurangi ketimpangan dengan prinsip “*no one left behind*”. Indonesia sudah memuat target pembangunan Indonesia yang sejalan dengan TPB/SDGs dalam RPJMN 2015-2019 dengan arah kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, keberlanjutan lingkungan, transparansi pemerintahan, serta pembangunan yang inklusif dan partisipatif.

Pencapaian target pembangunan tidak bisa dicapai jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Agar target Indonesia untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dapat terwujud, diperlukan investasi tingkat tinggi. Meski anggaran untuk pelayanan sosial telah naik sebesar 0,7 persen dari PDB pada 2015, angka tersebut masih di bawah rata-rata dunia yang sebesar 1,6 persen dari produk domestik bruto (PDB) dan rata-rata negara berkembang yang mencapai 1,5 persen dari PDB. Di sisi lain, pemerintah juga telah meningkatkan anggaran proteksi sosial yang pada 2016 sebesar 11,5 persen dari APBN menjadi 12,1 persen di 2017. “Dengan demikian, pembangunan yang bersumber dari alternatif pembiayaan lain seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) sangat didorong untuk efisiensi APBN,” ungkap Menteri Bambang.

Indonesia, negara dengan populasi muslim terbesar dunia, juga memiliki potensi tersembunyi yang harus dimanfaatkan dengan baik, hati-hati, dan penuh amanah, yakni dana sosial keagamaan, termasuk zakat dan wakaf. Jika dikelola dengan baik, dana tersebut dapat berkontribusi secara signifikan pada berbagai upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan pendapatan sehingga target RPJMN 2015-2019, TPB/SDGs, serta Agenda 2030 dapat tercapai. Sejumlah pemerintah daerah, seperti Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten Sragen sudah menjadikan zakat dan wakaf sebagai penyokong utama program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK).

Saat ini, Indonesia memiliki tanah wakaf sekitar 4,3 miliar meter persegi dengan mayoritas penggunaan sebagai masjid dan pemakaman umum, sedangkan wakaf tunai baru mencapai 22 miliar rupiah. Wakaf harus diatur agar dapat bermanfaat dengan baik seperti untuk pembangunan rumah sakit dan kebutuhan wirausaha syariah. Sementara itu, data terakhir menunjukkan bahwa pengumpulan zakat pada 2016 mencapai 2,3 triliun rupiah. Angka tersebut diprediksi hanya sebesar tiga persen dari potensi seharusnya. Maka, sejumlah pihak berwenang harus berusaha secara maksimal agar dapat mengumpulkan zakat yang dapat menjadi sumber dana program pengentasan kemiskinan seperti penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi, terutama bagi masyarakat yang hidup jauh di bawah garis kemiskinan. Menteri Bambang mengapresiasi langkah Majelis Ulama Indonesia yang telah menerbitkan Fatwa MUI tentang pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi pada 2015 serta kolaborasi Bank Indonesia, Kementerian Agama, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan Badan Wakaf Indonesia yang meluncurkan rencana aksi komprehensif yang fokus untuk menjalankan sistem pelaporan dan tata kelola obyek zakat dan wakaf serta perbaikan akuntabilitas laporan zakat dan wakaf. “Diperlukan peran menyeluruh dari semua pihak untuk bersama mengatasi tantangan implementasi Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah terkait penggunaan zakat dan wakaf adalah perbaikan sumber daya manusia pengelola, pendaftaran obyek zakat dan wakaf, sistem penggunaan zakat dan wakaf, serta tata kelola zakat dan wakaf tersebut,” tutup Menteri Bambang.

Jakarta, 24 Agustus 2017

Thohir Afandi  
Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan  
Kementerian PPN/Bappenas

Untuk informasi lebih lanjut:  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310  
Telepon: (021) 31936207, 3905650  
Faksimile: (021) 31901154  
Email: [humas@bappenas.go.id](mailto:humas@bappenas.go.id)